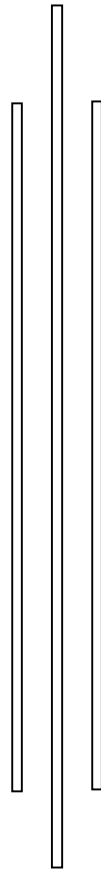




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2015
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2015

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab	4
Laporan Realisasi Anggaran.....	5
Neraca	6
Laporan Operasional	7
Laporan Perubahan Ekuitas	8
Catatan Atas Laporan Keuangan	9
BAB I Pendahuluan	9
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	9
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja	13
2.1 Ekonomi Makro	13
2.2 Kebijakan Keuangan.....	13
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	13
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	14
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	14
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	15
- BAB IV Kebijakan Akuntansi	16
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan	16
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	16
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	16
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Denga Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah.....	21

-	BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	22
5.1	Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	22
5.1.1	Pendapatan – LRA.....	31
5.1.2	Pendapatan – LO	33
5.1.3	Aset.....	22
5.1.4	Kewajiban	30
5.1.5	Ekuitas Dana	35
-	BAB VI PENJELASAN TAMBAHAN.....	36
	Lampiran – lampiran	38

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Blitar yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, Maret 2015
Inspektur Kabupaten Blitar

SUYANTO, SH, MM
NIP. 19590930 198603 1 008

INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(diganti Print out Simda)

***LAPORAN-SKPD-PEMBUKUAN AKRUAL-NERACA-NERACA SEBELUM
PENGAGABUNGAN (SAP)***

INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR LAPORAN OPERASIONAL

PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2015

(diganti Print out Simda)

LAPORAN-SKPD-PEMBUKUAN AKRUAL-LAPORAN OPERASIONAL

**INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(diganti Print out Simda)

LAPORAN-SKPD-PEMBUKUAN AKRUAL-LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR KABUPATEN BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan tahun 2015 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2015 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 0 mencapai 0 % dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 7.460.225.689,- atau mencapai 91.57 % dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2015 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 1.301.699.568,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 1.370.000,- investasi jangka panjang sebesar Rp. 0,00 aset tetap sebesar Rp. 1.291.109.068,- dana cadangan Rp. 0,00 dan aset lainnya sebesar Rp. 9.220.000,-

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 7.499.376.365,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 7.499.376.365,- dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,00

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 6.197.676.797,-

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp. 0,00 Beban dari kegiatan Operasional Rp. 7.057.042.652,00 dan surplus/defisit sebesar Rp. 7.057.042.652,00

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas awal sebesar Rp. 859.365.855,00 Surplus/Defisit Rp. 7.057.042.652,00 dan Ekuitas akhir sebesar Rp. 6.197.676.797,00

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasioanal, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 20/E);
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 46/E);

16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015 Nomor 30/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Inspektorat Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakandi bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2015, Inspektorat Kabupaten Blitar mempunyai 5 (lima) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- e. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015 secara keseluruhan sebesar Rp 8.147.204.000,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Operasi (sesuai di Laporan Simda)	7.273.365.100,00
2.	Belanja Modal (sesuai di Laporan Simda)	873.838.900,00
	Surplus/(Defisit)	(8.147.204.000,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Inspektorat Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015 Nomor 04 Tahun 2015, tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 8.147.204.000,00 terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 8.147.204.000,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Blitar selama tahun 2015 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1.	Belanja	8.147.204.000,00	7.460.225.689,00	91,57
	- <i>Belanja Operasi</i>	7.273.365.100,00	6.737.585.689,00	92,63
	- <i>Belanja Modal</i>	873.838.900,00	722.640.000,00	82,70
	Surplus/(Defisit)	(8.147.204.000,00)	(7.460.225.689,00)	91,57

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2015 sebesar Rp.7.460.225.689,00 atau 91,57 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 686.978.311,00 atau 8,43 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1.	Belanja Pegawai	2.544.454.000,00	2.512.582.220,00	98,75
2.	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	741.796.100,00	688.345.829,00	92,79
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.007.188.900,00	824.970.310,00	81,90
4.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	254.497.600,00	192.515.000,00	75,64
5.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	975.060.000,00	934.350.000,00	95,82
6.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	609.260.000,00	460.920.000,00	75,65
7.	Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kabupaten Blitar	85.490.000,00	72.485.830,00	84,79
8.	Inventarisasi, Pelaporan, dan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan	65.562.400,00	36.346.500,00	55,43
9.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	46.755.000,00	46.375.000,00	99,19
10.	Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	164.040.000,00	145.150.000,00	88,48
11.	Pengendalian Disiplin Aparatur	9.110.000,00	8.990.000,00	98,68
12.	Evaluasi LAKIP	54.560.000,00	53.640.000,00	98,31
13.	Pelaksanaan Pengawasan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	194.000.000,00	134.370.000,00	69,26
14.	Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa	593.880.000,00	581.750.000,00	97,96
15.	Workshop Perundang-Undangan	198.950.000,00	198.950.000,00	100
16.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Inspektorat Kabupaten Blitar	398.460.000,00	374.890.000,00	94,08
17.	Kajian tentang Penetapan Standart analisa Biaya Honorarium atas kegiatan Inspeksi	207.220.000,00	197.800.000,00	95,45
18.	Rapat Koordinasi Pengawasan	33.370.000,00	27.215.689,00	81,56
	Total	8.147.204.000,00	7.460.225.689,00	91,57

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Kurangnya jumlah aparat fungsional di Inspektorat Kabupaten Blitar;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan

b. Belanja-LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar

investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

g. Pendapatan LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

h. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

		31 Desember 2015	31 Desember 2014
		(Rp)	(Rp)
a. Aset		1.301.699.568,00	859.365.855,00
	Saldo Aset Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.587.781.390,00 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
(1)	Aset Lancar	1.370.500,00	1.028.000,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	1.291.109.068,00	849.117.855,00
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	9.220.000,00	9.220.000,00
Jumlah Aset		1.312.290.068,00	859.365.855,00

		31 Desember 2015	31 Desember 2014
		(Rp)	(Rp)
1) Aset Lancar		1.370.500,00	1.028.000,00
	Saldo Aset Lancar Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.370.000,00 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Piutang Retribusi	0,00	0,00
(c)	Piutang lain-lain	0,00	0,00
(d)	Persediaan	1.370.000,00	1.028.000,00
Jumlah		1.370.000,00	1.028.000,00

		31 Desember 2015	31 Desember 2014
		(Rp)	(Rp)
(a) Kas		0,00	0,00

Saldo Kas Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2015 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
(b) Piutang Retribusi	0,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi Inspektorat Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00 terdiri dari Nihil dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	0,00
2	0,00
3	0,00
Jumlah		0,00

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
(c) Piutang lain-lain	0,00	0,00

Saldo piutang lain-lain Inspektorat Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	0,00
2	0,00
3	0,00
Jumlah		0,00

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
(d) Persediaan	1.370.500,00	1.028.000,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Inspektorat Kabupaten Blitar yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Inspektorat Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.370.500,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	927.500,00
(2)	Persediaan Barang Cetak	425.000,00
(3)	Persediaan Benda Pos	18.000,00
	Jumlah	1.370.500,00

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Investasi jangka Panjang Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar nihil.

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
3) Aset Tetap	1.291.109.068,00	849.117.855,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 849.117.855,00 dan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.291.109.068,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
(a)	Tanah	0,00	0,00
(b)	Peralatan dan Mesin	2.461.302.390,00	1.715.022.390,00
(c)	Gedung dan Bangunan	46.125.000,00	46.125.000,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	69.723.500,00	69.723.500,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	40.000,00	40.000,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(1.286.081.822,00)	(981.793.035,00)
Jumlah Aset		1.291.081.068,00	849.117.855,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 441.963.213,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2015 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2014 (Rp. 1.291.081.068,00 - Rp. 849.117.855,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
(a) Tanah	0,00	0,00

Saldo Tanah Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2015

Penambahan Aset Tetap Tanah

Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Belanja Modal	0,00
Hibah	0,00

Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00	+
Jumlah penambahan		
Pengurangan Aset Tetap Tanah		
Penghapusan	0,00	
Mutasi	0,00	
Hibah	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00	+
Jumlah Pengurangan		0,00 +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2015		0,00

	<u>31 Desember 2015</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>
(b) Peralatan dan Mesin	2.461.302.390,00	1.715.022.390,00

Saldo peralatan dan mesin Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.461.302.390,00 dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada *lampiran mutasi aset tetap 2015*

Saldo Awal Per 1 Januari 2015 **1.715.022.390,00**

Penambahan Peralatan dan Mesin

Belanja Pegawai	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	722.640.000,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	148.374.470,00	
Koreksi	36.165.000,00	+
Jumlah penambahan		907.179.470,00

Pengurangan Peralatan dan Mesin

Penghapusan	12.525.000,00
-------------	---------------

Mutasi	0,00	
Hibah	0,00	
Reklasifikasi	148.374.470,00	
Koreksi	0,00	+
Jumlah Pengurangan		<u>160.899.470,00 -</u>
Saldo Akhir Per 31 Desember 2015		2.461.302.390,00

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	46.125.000,00	46.125.000,00

Saldo gedung dan bangunan Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 46.125.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2015 **46.125.000,00**

Penambahan Gedung dan Bangunan

Belanja Pegawai	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	0,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00	+
Jumlah penambahan	<u>0,00</u>	0,00

Pengurangan Gedung dan Bangunan

Penghapusan	0,00	
Mutasi	0,00	
Hibah	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00	+
Jumlah Pengurangan	<u>0,00</u>	0,00 +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2015 **46.125.000,00**

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	69.723.500,00	69.723.500,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 69.723.500,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2015 **69.723.500,00**

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Belanja Pegawai	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	0,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00 +	
Jumlah penambahan	<u>0,00</u>	0,00

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Penghapusan	0,00	
Mutasi	0,00	
Hibah	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00 +	
Jumlah Pengurangan	<u>0,00</u>	0,00 +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2015 69.723.500,00

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	40.000,00	40.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 40.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2015 **40.000,00**

Penambahan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pegawai	0,00
-----------------	------

Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	0,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00 +	
Jumlah penambahan	0,00	0,00
Pengurangan Aset Tetap Lainnya		
Penghapusan	0,00	
Mutasi	0,00	
Hibah	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00 +	
Jumlah Pengurangan	0,00	0,00 +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2015		40.000,00

	<u>31 Desember 2015</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00.

	<u>31 Desember 2015</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>
(g) Akumulasi Penyusutan	1.286.081.822,00	981.793.035,00

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.286.081.822,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Akun	31 Desember 2015	31 Desember 2014
1	<i>Peralatan Dan Mesin</i>	(1.266.193.209,00)	(964.931.010,00)
3	<i>Gedung dan Bangunan</i>	(5.535.000,00)	(4.612.500,00)
2	<i>Jalan, Jaringan dan Irigasi</i>	(14.353.613,00)	(12.249.525,00)
	JUMLAH	(1.286.081.822,00)	(981.793.035,00)

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
5) Aset Lainnya	9.220.000,00	9.220.000,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 9.220.000,00 dan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 9.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	0,00	0,00
(b)	Aset Lain-lain	9.220.000,00	9.220.000,00
Jumlah Aset		9.220.000,00	9.220.000,00

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
(b) Aset Lain-lain	9.220.000,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 9.220.000,00, terdiri dari (Ex :Aset Tetap yang rusak sebesar Rp. 9.220.000,00, , dengan perincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2015 **9.220.000,00**

Penambahan Aset Lain-Lain

Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Belanja Modal	0,00
Hibah	0,00
Mutasi	0,00
Reklasifikasi	0,00
Koreksi	0,00 +

Jumlah penambahan	0,00	0,00
Pengurangan Aset Lain-lain		
Penghapusan	0,00	
Mutasi	0,00	
Hibah	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00 +	
Jumlah Pengurangan	0,00	0,00 +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2015		9.220.000,00

Rincian saldo asset lain-lain sebesar Rp. 9.220.000,00 sebagai berikut :

Nomor	Aset	Rusak	Hibah
1	Mesin Ketik	420.000,00	
2	Monitor	800.000,00	
3	Printer	3.200.000,00	
4	CPU	4.200.000,00	
Jumlah		9.220.000,00	0,00

	<u>31 Desember 2015</u>	<u>31 Desember 2014</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
b. Kewajiban	7.499.376.365,00	0,00

Saldo Kewajiban Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 7.499.376.365,00 dengan rincian sebagai berikut

	<u>31 Desember 2015</u>	<u>31 Desember 2014</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
1) Kewajiban Jangka Pendek	7.499.376.365,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 7.499.376.365,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Utang Beban	2.985.676,00
(b)	Utang Jangka Pendek Lainnya	36.165.000,00
(c)	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	7.460.225.689,00
Jumlah Hutang		7.499.376.365,00

Utang Beban sebesar Rp. 2.985.676,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Beban Jasa Telepon	80.582,00
(b)	Beban Jasa Listrik	1.954.524,00
(c)	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	140.000,00
(d)	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	810.570,00
Jumlah Hutang		2.985.676,00

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 36.165.000,00 Merupakan utang beban belanja modal dari pengadaan kendaraan dinas Inspektorat.

Sedangkan kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 7.460.225.689,00 merupakan saldo R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan dengan rekening R/K SKPD pada BPKAD sebagai BUD.

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00.

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
c. Ekuitas Dana	(6.197.676.797,00)	859.365.855,00
Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Inspektorat sebesar Rp. (6.197.676.797,00)		

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
a. Pendapatan	0,00	0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan Inspektorat Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Inspektorat Kabupaten Blitar Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2015 serta realisasi Tahun Anggaran 2014, adalah *Nihil*

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
b. Belanja	7.460.225.689,00	5.966.691.000,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2015 sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
1) Belanja Operasi	6.737.585.689,00	5.826.747.000,00

Belanja Operasi Inspektorat Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2015 Rp. 6.737.585.689,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2015	2014
(a)	Belanja Pegawai	2.544.454.000,00	2.512.582.220,00	3.510.554.006,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	4.728.911.100,00	4.225.003.469,00	1.782.375.557,00
Jumlah		7.273.365.100,00	6.737.585.689,00	5.292.929.563,00

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
2) Belanja Modal	722.640.000,00	132.625.000,00

Belanja Modal Inspektorat Kabupaten Blitar meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, dengan realisasi tahun 2015 Rp. 722.640.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2015	2014
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 1	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin			
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	584.344.500,00	532.215.000,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Mesin Ketik.	7.500.000,00	5.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair	36.025.000,00	8.000.000,00	21.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer	232.325.000,00	167.825.000,00	75.375.000,00
	Belanja Modal Alat Penghancur Kertas	0,00	0,00	20.500.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	0,00	0,00	5.000.000,00
	Belanja Modal Pengadaan alat Rumah Tangga	0,00	0,00	10.750.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	13.644.400,00	9.600.000,00	0,00
	Jumlah 2	873.838.900,00	722.640.000,00	132.625.000,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 3	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Modal	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2015	2014
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 4	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (5)	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Modal	873.838.900,00	722.640.000,00	132.625.000,00

3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

31 Desember 2015
(Rp)

a. Pendapatan LO

0,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2015 dan sebagai berikut, adalah *Nihil*.

31 Desember 2015
(Rp)

b. Beban Operasi

7.057.042.652,00

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2015, sebagai berikut.

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 yang terealisasi sebesar Rp. 2.512.582.220,-

Sedangkan Beban Pegawai menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Pegawai	Realisasi (Tahun 2015)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	2.401.962.220,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	110.620.000,00
3.	Beban Penerimaan Lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH dan WKDH - LO	0,00
4.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – LO	0,00
5.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00
6.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00
7.	Uang Lembur – LO	0,00
	Jumlah Total	2.512.582.220,00

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 4.227.646.645,00

Sedangkan Beban Barang dan Jasa menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Barang dan Jasa	Realisasi (Tahun 2015)
1.	Beban Persediaan Bahan Habis Pakai	77.663.134,00
2.	Beban Persediaan Bahan/Material	12.370.000,00
3.	Beban Jasa Kantor	70.745.034,00
4.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	41.290.310,00
5.	Beban Cetak dan Penggandaan	64.231.540,00
6.	Beban Honorarium PNS – LO	2.027.165.000,00
7.	Beban Makanan dan Minuman	138.045.500,00
8.	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00
9.	Beban Pakaian Kerja	500.000,00
10.	Beban Perjalanan Dinas	1.040.647.127,00
11.	Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	534.020.000,00
12.	Beban Pemeliharaan	12.170.000,00
13.	Beban Jasa Konsultasi	197.800.000,00
Jumlah Total		4.227.646.645,00

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 yang terealisasi sebesar NIHIL.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 yang terealisasi sebesar NIHIL.

5) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum tahun anggaran 2014, sedangkan belanja modal tahun 2015 telah dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2015.

Sedangkan Beban Penyusutan menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Penyusutan	Realisasi (Tahun 2015)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	313.787.199,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	922.500,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.104.088,00
Jumlah Total		316.813.787,00

6) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 yang terealisasi sebesar NIHIL.

7) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan Beban Lain-lain periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 yang terealisasi sebesar NIHIL.

c. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.(7.057.042.652,00)

d. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2015 surplus sebesar Rp. (7.057.042.652,00)

4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan.

- a. Saldo awal ekuitas tahun 2015 sebesar Rp. 859.365.855,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2014.
- b. Surplus/defisit – LO sebesar Rp. 7.057.042.652,00 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas Tahun 2015
- c. Koreksi Ekuitas sebesar Rp. 0,00
- d. Ekiutas akhir sebesar Rp. 6.197.676.797,00

BAB VI
PENJELASAN TAMBAHAN

SKPD Inspektorat pada penyusunan Laporan Keuangan 2015 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Restatement Neraca Per 31 Desember 2014 (setelah Audit).
2. Perhitungan Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2014.
3. Perhitungan penyusutan per 31 Desember 2015.

Blitar, Maret 2015
Inspektur Kabupaten Blitar

(SUYANTO, SH, MM)
NIP. 19590930 198603 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SKPD
 Jalan Telp.
B L I T A R

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini tanggal Tiga puluh satu Desember Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.59 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor tanggal ditugaskan mengurus uang, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti – bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

- | | |
|---|-------|
| a. Uang kertas | : Rp. |
| b. Uang logam | : Rp. |
| c. SP2D/ alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan | : Rp. |
| d. Saldo Bank | : Rp. |
| e. Surat Berharga lain | : Rp. |
| Jumlah | : Rp. |
| Saldo menurut buku | : Rp. |
| Perbedaan Positif/Negatif | : Rp. |
| Perbedaan karena : | |

Yang diperiksa,
 Bendahara Pengeluaran

Blitar, 31 Desember 2015
 Yang memeriksa,
 Pengguna Anggaran

NAMA LENGKAP

NIP.

NAMA LENGKAP

NIP.

Foto Copy Rekening Koran



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SKPD
 Jalan Telp.
B L I T A R

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini tanggal Tiga puluh satu Desember Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Pengguna Barang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.59 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Bendahara Barang

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor tanggal ditugaskan mengurus barang, berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti – bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami mendapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2015:

No	Nama Persediaan	Nilai (Rp.)
1.	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp.
2.	Persediaan Alat Listrik	Rp.
3.		Rp.
4.		Rp.
5.		Rp.
6.		Rp.
7.		Rp.
8.		Rp.
9.		Rp.

Rincian hasil pemeriksaan fisik persediaan terlampir.

Yang diperiksa,
 Pengurus Barang

Blitar, 31 Desember 2015
 Yang memeriksa,
 Pengguna Barang

NAMA LENGKAP
 NIP.

NAMA LENGKAP
 NIP.

Lampiran Inventarisasi Aset Daerah Perolehan TA 2015

Daftar Inventarisasi Aset Daerah Extra Komptabel Perolehan 2015

Rekap Perhitungan Penyusutan per 31 Desember 2015

Rekap Perhitungan Akumulasi per 31 Desember 2014

Lain-lain:

- Memo Jurnal Penyesuaian/koreksi

- Bukti Penyesuaian/koreksi